



Archipel

Études interdisciplinaires sur le monde insulindien

95 | 2018

Varia

Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965

Quelques notes sur l'historiographie du Mouvement du 30 Septembre 1965

Asvi Warman Adam



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/archipel/604>

DOI : [10.4000/archipel.604](https://doi.org/10.4000/archipel.604)

ISSN : 2104-3655

Éditeur

Association Archipel

Édition imprimée

Date de publication : 29 juin 2018

Pagination : 11-30

ISBN : 978-2-910513-79-5

ISSN : 0044-8613

Référence électronique

Asvi Warman Adam, « Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965 », *Archipel* [En ligne], 95 | 2018, mis en ligne le 01 juillet 2018, consulté le 10 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/archipel/604> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/archipel.604>

Association Archipel

ASVI WARMAN ADAM¹

Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965

Pendahuluan

Berhentinya Soeharto sebagai Presiden tahun 1998 mengubah sejarah Indonesia (Adam 2006). Muncul desakan untuk mengungkapkan hal-hal yang ditutup-tutupi selama Orde Baru serta meluruskan penulisan sejarah (Adam 2000).

Kalau ada sumber yang baru, metode atau perspektif baru tentu sejarah dapat ditulis kembali. Namun ada sesuatu yang khas pada masa Orde Baru bahwa sejarah itu telah digunakan sebagai alat penindas. Salah satu yang berproses di Indonesia selama 20 tahun era reformasi ini pada hakikatnya perubahan “sejarah sebagai penindas” menjadi “sejarah sebagai pembebas”. Pidato pengukuhan guru besar Bambang Purwanto di Universitas Gadjah Mada tahun 2004 dan kemudian diterbitkan bersama-sama penulis dalam sebuah buku tipis oleh Ombak Yogyakarta sebetulnya menyinggung tentang sejarah sebagai pembebas (Purwanto & Adam 2005). Gagasan tentang sejarah sebagai pembebas ini kemudian dikembangkan sebagai pidato pengukuhan guru besar Singgih Tri Sulistiyono (2008) di Universitas Diponegoro Semarang dalam konteks yang lebih umum.

Historiografi Indonesia: beberapa pikiran

Tulisan ini merupakan sumbangan kepada historiografi Gerakan 30 September 1965. Tidak digunakan label G30S/PKI karena istilah yang

1. Peneliti Ahli Utama LIPI, Jakarta

digunakan gerakan itu sendiri adalah Gerakan 30 September, kata PKI baru ditempelkan sejak tahun 1966 dengan penafsiran tunggal bahwa PKI adalah dalang kudeta tersebut. Artikel ini membahas sejumlah tulisan yang telah terbit mengenai G30S dari tahun 1965 sampai 2018. Selain tulisan juga ditambahkan informasi tentang filem dan inisiatif yang bersifat sejarah yang berkaitan dengan tema ini.

Sejak proklamasi kemerdekaan, penulisan sejarah nasional dapat dibagi atas tiga tahap atau gelombang seperti yang dikemukakan Kuntowijoyo (2000). Gelombang pertama disebut sebagai dekolonisasi sejarah yang diawali dengan Seminar Sejarah Nasional pertama tahun 1957 di Yogyakarta. Pada tahap ini terdapat keinginan yang kuat dalam masyarakat sesudah merdeka untuk memiliki sejarah nasional sendiri yang tidak lagi ditulis oleh penjajah Belanda. Pendekatan sejarah yang Neerlandosentris diubah menjadi pendekatan yang Indonesiasentris. Gelombang kedua ditandai dengan pemanfaatan ilmu sosial dalam sejarah yang terlihat secara menonjol pada Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta tahun 1970. Pendekatan ini dipelopori oleh Sartono Kartodirdjo. Pendekatan ilmu sosial ini memiliki dua keuntungan, pertama secara akademis ia meningkatkan mutu penulisan sejarah. Secara politis, sejarah bersikap netral terhadap penguasa bahkan jauh dari posisi sebagai kritik sosial. Namun demikian, pada waktu itu bersamaan muncul pula sejarawan yang melakukan rekayasa sejarah untuk kepentingan rezim yang memerintah. Sejarah menjadi alat legitimasi bagi penguasa sekaligus alat represi terhadap kelompok yang berseberangan. Sementara itu gelombang ketiga dalam historiografi Indonesia dimulai sesudah kejatuhan Soeharto dan ditandai dengan adanya upaya pelurusan terhadap hal-hal yang kontroversial dalam sejarah yang ditulis semasa Orde Baru.

Pelurusan sejarah yang merupakan gelombang ketiga perkembangan historiografi Indonesia yang dimulai sejak era reformasi bertujuan membongkar manipulasi sejarah yang terjadi masa sebelumnya. Fakta sejarah yang tidak tepat dikoreksi, misalnya pencungkilan mata para jenderal tanggal 1 Oktober 1965 ternyata tidak benar. Penjelasan sejarah yang tidak lengkap perlu ditambahi: tidak cukup menguraikan Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional tetapi dilengkapi dengan Sarikat Islam. Sementara sumber sejarah yang belum jelas perlu dicari misalnya naskah Supersemar yang otentik. Jadi tugas dari pelurusan sejarah adalah menepatkan, melengkapi, dan memperjelas suatu peristiwa sejarah.

Pembaharuan sejarah kasus 1965 dilaksanakan dengan menggunakan sumber baru (misalnya arsip yang sudah bisa dibuka di Amerika Serikat dan China), metodologi sejarah lisan, yang menjadi menonjol ketika dokumen tertulis sulit didapat, dan perspektif baru (sejarah bukan hanya ditulis penguasa atau pemenang tetapi juga para korban). Cukup menonjol para era reformasi buku-buku yang merupakan sejarah korban yakni sejarah yang

ditulis berdasarkan perspektif pihak yang merasa dirugikan atau yang menjadi korban dalam suatu peristiwa sejarah.

Sejarah lisan terutama berkembang di Indonesia dengan proyek penulisan sejarah penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1970-an. Namun dengan pergantian rezim tahun 1998, pengerjaan sejarah lisan menemukan momentum baru. Keterbatasan dokumen tertulis menyebabkan sejarah lisan para korban 1965 ini menjadi penting. Ribuan orang telah diwawancarai dan kesaksian mereka dapat ditemukan misalnya pada perpustakaan Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta, atau pada Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam, (khusus untuk eksil 1965).

Pelurusan sejarah itu tentu tidak luput dari kritik. Apakah sejarah yang sudah dikoreksi itu pada suatu saat nanti juga akan dibengkokkan? Dalam hal ini Antoon de Baets (2009) menawarkan solusinya berupa kode etik untuk sejarawan yang terdiri dari 20 fasal mencakup lingkup, implementasi, tugas utama (riset sejarah, penerbitan dan pengajaran), pemilihan topik, seleksi informasi, akses informasi, metode objektif dan kritis, evaluasi moral. Fasal 10 kode etik ini menyangkut aspek yang sangat penting yaitu integritas. Integritas, menurut De Baets, adalah landasan moral dari kerja sejarawan sehingga mereka menentang penyalahgunaan sejarah. Tentunya kode etik ini dapat diterapkan pada lingkungan profesi seperti MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia).

Menghilangkan stigma

Tragedi 1965 tentu dapat dilihat dalam tiga tahap: prolog, peristiwa G30S, dan epilog. Yang disebut prolog tentu masa yang kurang dari lima tahun menjelang meletusnya G30S (versi resmi Orde Baru menganggap prolog ini dimulai sejak tahun 1948). Diikuti pembunuhan enam orang jenderal yang hanya berlangsung satu malam bahkan beberapa jam pada tanggal 1 Oktober 1965. Sementara itu epilog atau dampak G30S itu berlangsung sangat lama, sepanjang Orde Baru yang memerintah selama tiga dekade bahkan trauma itu masih terasa pada era reformasi.

Setelah pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia, terjadi pula desukarnoisasi melalui “pengamanan” selama bertahun-tahun 15 Menteri yang loyal kepada Bung Karno, TAP MPRS yang konsiderannya mendiskreditkan Soekarno, pelarangan peringatan lahirnya Pancasila oleh Kopkamtib sejak 1 Juni 1970, rekayasa sejarah Pancasila dan penerbitan buku standar Sejarah Nasional Indonesia, terutama jilid 6.

Mereka yang (dituduh) terlibat G30S dan keluarganya ditangkap, dibunuh dan diberi stigma di tengah masyarakat. Mereka dan keluarganya didiskriminasi, tidak boleh menjadi pegawai negeri atau anggota ABRI. Pada gilirannya pelabelan ini juga dipakai oleh rezim Orde Baru untuk keperluan praktis yakni membungkam musuh politik yang kritis dengan menuduhnya sebagai anggota

PKI atau mengusir petani atau membeli tanah mereka sangat murah dan bila mereka tidak mau akan dicap komunis.

Era reformasi membuka peluang untuk berekspresi dan bersuara. Kini sejarah menjadi pembebas. Istilah “pelurusan sejarah” sebetulnya dapat diperdebatkan secara ilmiah, tetapi kata itu menjadi obat atau penawar (*healing*) bagi para korban. Karena konsep itu menyiratkan telah terjadi kesalahan atau kekeliruan sejarah selama tiga dekade dan kini sedang berlangsung proses perubahan atau perbaikan. Jadi pelurusan sejarah ini merupakan bagian dari upaya menghilangkan stigma yang dialami para korban dan keluarganya.

Menarik untuk membandingkan proses pelurusan sejarah yang terjadi pada tiga kelompok masyarakat. Yang dua berjalan lancar namun yang satu lagi masih tersendat. Pelurusan sejarah AURI berjalan mulus. Bahkan purnawirawan AURI yang meminta agar pemutaran film “Pengkhianatan G30S/PKI” dihentikan penayangannya. Demikian pula kemajuan yang signifikan terjadi dalam penghilangan diskriminasi dan stigma bagi orang Tionghoa. Konstitusi Indonesia sudah menghapus kata “asli” sehingga tidak dibedakan lagi antara warganegara Indonesia “keturunan” atau bukan. Sudah ada tokoh Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional sebagaimana etnis lain di Indonesia yakni John Lie yang diangkat tahun 2009.

Namun hambatan masih ditemui pada korban kiri. Penulisan memoir, buku, film dokumenter bahkan program sejarah di televisi telah mengungkapkan banyak hal yang ditutupi semasa Orde Baru. Tetapi dalam pengajaran sejarah terjadi kemunduran terutama sejak kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006 yang hanya mengajarkan versi resmi pemerintah Orde Baru mengenai G30S. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 diberikan penjelasan tentang berbagai versi G30S 1965. Namun kurikulum yang sudah disosialisasikan kepada guru-guru di sekolah selama dua tahun itu tidak jadi disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena adanya protes elite Islam kepada DPR. Pemberian rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) Berat masih terkendala.

Tulisan ini menjelaskan lima tonggak penting historiografi G30S dari tahun 1965 sampai 2018. Episode pertama (1965-1968) berisi perdebatan siapa dalang G30S: apakah PKI atau ini hanya masalah intern Angkatan Darat? Pada tahap kedua (1968-1998) terjadi pembuatan sejarah resmi pemerintah yang hanya memperbolehkan satu pandangan. Desukarnoisasi juga terjadi pada masa ini (Adam 2007, 2010). Kejatuhan pemerintahan Soeharto tahun 1998 menandai tonggak ketiga yang merupakan pelurusan sejarah, para korban berbicara dan menulis. Terbitnya buku John Roosa, *Pretext for Mass Murder* (2006), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (*Dalih Pembunuhan Massal* 2008) menjadi episode keempat, sebuah narasi baru yang utuh mengenai G30S telah dikemukakan. Pemutaran film *Jagal*

(*The Act of Killing*) tahun 2012 dan *Senyap (The Look of Silence)* tahun 2014, karya Joshua Oppenheimer, menandai tonggak kelima dari historiografi G30S ketika para pelaku mengaku. Pembagian periode itu tidak bersifat ketat, dalam pengertian tidak keseluruhan masa tersebut memiliki ciri-ciri khas seperti yang diuraikan di sini namun yang lebih signifikan adalah tonggak-tonggak yang menandai perkembangan historiografi tersebut.

Episode pertama

Buku yang pertama dipublikasi tentang Gerakan 30 September 1965 adalah *40 Hari Kegagalan "G30S", 1 Oktober-10 November 1965*, yang diterbitkan oleh Lembaga Sejarah, Staf Pertahanan Keamanan, atas prakarsa Jenderal Nasution yang menugasi beberapa pengajar sejarah Universitas Indonesia. Cetakan pertama dikeluarkan 27 Desember 1965 dengan waktu penyiapan hanya sebulan. Buku ini walaupun belum menggunakan label G30S/PKI sudah menyinggung keterlibatan PKI dalam percobaan kudeta tersebut.

Naskah berikutnya tentang G30S yang kemudian dikenal sebagai "Cornell Paper" keberadaannya terkuak kepada publik Amerika Serikat karena sebuah tulisan di surat kabar *The Washington Post*, 5 Maret 1966. Laporan penelitian tersebut yang ditulis Ben Anderson, Ruth McVey dan F.P. Bunnell, baru secara resmi diterbitkan tahun 1971. Dokumen ini menyebut percobaan kudeta tersebut sebagai persoalan intern Angkatan Darat.

Tahun 1967 Mayjen Soewarto, Komandan Seskoad (Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat), diundang ke lembaga Rand Corporation, Amerika Serikat. Guy Jean Pauker dari Rand Corporation memberi tahu Soewarto tentang keberadaan *Cornell Paper* dan menyarankan agar ditulis buku tandingan. Oleh sebab itu Soewarto kemudian mengirim Nugroho Notosusanto dan Letkol (Letnan Kolonel) Ismail Saleh, seorang jaksa dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang mengadili pelaku G30S, ke Amerika Serikat. Dengan bantuan Guy Jean Pauker, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh berhasil menulis buku dalam bahasa Inggris, *The Coup Attempt of September 30 Movement in Indonesia*, yang ditujukan untuk menolak *Cornell Paper* (1968).

Tahun 1970-an Benny Murdani menyerahkan berbagai dokumen Mahmilub ke perpustakaan Cornell University untuk memperlihatkan telah dilakukan pengadilan (militer) setelah G30S. Termasuk berkas perkara Mahmilub Heru Atmodjo yang ternyata melampirkan *visum et repertum* jenazah enam orang jenderal yang menjadi korban G30S. Dokumen tersebut sempat terbaca oleh Ben Anderson yang selanjutnya menulis artikel yang menggemparkan pejabat Indonesia. Tidak benar terjadi pencungkilan mata dan penyiletan kemaluan para jenderal (Anderson 1987).

Episode kedua

Setelah berhasil melakukan standardisasi sejarah ABRI, Nugroho Notosusanto melakukan hal yang sama dalam sejarah nasional. Dalam jilid 6 *Sejarah Nasional Indonesia*, yang disunting Nugroho Notosusanto, diberikan legitimasi kepada Orde Baru sekaligus dilakukan desukarnoisasi. Nugroho berperan penting dalam mempersoalkan kelahiran Pancasila oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah memimpin Pusat Sejarah ABRI, sebelum meninggal tahun 1985, Nugroho Notosusanto sempat diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendidikan. Ismail Saleh kelak menjadi Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman.

Sebelumnya Nugroho Notosusanto memprakarsai pembuatan film *Pengkhianatan G30S/PKI* yang disutradarai Arifin C. Noer tahun 1984. Film itu wajib tayang di layar televisi setiap tanggal 30 September malam. Selanjutnya film ini dibuatkan novel oleh Arswendo Atmowiloto dengan judul serupa (1988).

Buku *The Coup Attempt* itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1989 (ketika salah seorang penulisnya sudah meninggal) dengan judul *Tragedi Nasional, Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Dirasa tidak cukup, pemerintah melalui Sekretariat Negara merasa perlu menerbitkan buku putih *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* tahun 1992. Di penghujung kekuasaan Orde Baru, tahun 1997 Alex Dinuth menyunting dua buku: *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis* dan *Dokumen Terpilih Sekitar G30S/PKI* (1997a, 1997b).

Karena hanya boleh versi tunggal pemerintah mengenai G30S, maka setiap buku yang menawarkan versi berbeda dilarang. Tahun 1995 Kejaksaan Agung membredel buku *Bayang-Bayang PKI* (Institut Studi Arus Informasi) yang mencoba menguraikan secara ringkas berbagai versi dalang G30S (Stanley 1995). Yang menarik, buku Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, yang edisi Indonesianya terbit tahun 1966, tidak dilarang. Buku itu menambahkan dua alinea yang tidak terdapat dalam buku asli berbahasa Inggris yang isinya Soekarno sangat merendahkan Hatta dan Sjahrir.

Episode ketiga

Setelah Soeharto berhenti menjadi Presiden tahun 1998 bermunculan gugatan sejarah. Para korban yang selama tiga puluh tahun dibungkam mulai bersuara, melakukan serangkaian pertemuan, diskusi, seminar serta pembuatan memoar. Istilah pelurusan sejarah yang saya lontarkan mendapat sambutan positif dari korban Orde Baru dan mendatangkan harapan bagi rehabilitasi.

Pihak yang pertama melakukan pelurusan sejarah adalah PP AURI (Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia). Mereka menerbitkan buku *Menyingkap Kabut Halim* (Katoppo dkk. 2000) untuk

menjelaskan bahwa Lubang Buaya, tempat pembuangan jenazah para jenderal, bukanlah bagian dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma melainkan termasuk wilayah Pondok Gede.

Masih terkait dengan upaya pelurusan sejarah, tahun 2000-2003 Ford Foundation bekerjasama dengan IKAPI memberikan subsidi untuk penerbitan buku bermutu yang sulit diterbitkan karena pasarnya terbatas. Penulis bersama Karlina Supelli dan Bondan Winarno menjadi tim penilai naskah. Buku-buku yang dibantu program ini antara lain buku Hermawan Sulistyio, *Palu Arit di Ladang Tebu* (2000), Robert Cribb, *Pembunuhan Massal di Jawa-Bali 1965/1966* (2003), dan Geoffrey Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Tesis S2 I.G. Krisnadi (2000) di UI tentang *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* serta *Memoar Pulau Buru* oleh Hersri Setiawan (2008) termasuk buku yang disubsidi. Demikian pula buku-buku tentang Aksi Sepihak seperti Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, yang berasal dari tesis S2 (2001).

Versi-versi G30S

Setelah meletus G30S 1965 muncul versi tentang dalang peristiwa tersebut. Menganggap dalang itu tunggal (PKI, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto atau CIA), baik perorangan atau kelompok, tentu tidak lengkap karena prosesnya sangat kompleks. Soekarno menyebut peristiwa itu sebagai pertemuan tiga sebab. Ini lebih maju karena aktornya terdiri dari unsur dalam negeri dan luar negeri. Namun tidak secara eksplisit menyebut “oknum yang tidak benar”. John Roosa telah mencoba membuat sebuah narasi yang utuh mengenai peristiwa itu. Namun menurut penulis peristiwa itu bukanlah dalih untuk pembunuhan massal, melainkan dalih untuk pengambilalihan kekuasaan (karena itulah tujuan finalnya).

Pemberontakan PKI

Satu Oktober 1965, pembantu Soeharto seperti Yoga Sugama sudah menduga PKI di balik kudeta. Departemen Pertahanan mengeluarkan buku “40 Hari Kegagalan ‘G-30-S’” (1965). Masih ditulis di antara dua tanda petik, meski analisisnya mengacu kepada PKI. Tahun 1994 terbit Buku Putih, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*.

Klik Angkatan Darat

Ilmuwan Cornell University, AS, Benedict R. Anderson dan Ruth Mc. Vey menulis *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia* (1971), yang kemudian dikenal sebagai *Cornell Paper*. Menurut mereka, gerakan 30 September adalah puncak konflik intern di tubuh Angkatan Darat.

Presiden Soekarno

Disampaikan John Hughes (1967) dan Antonie Dake (1973). Skenario yang dipersiapkan Soekarno untuk melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi AD. PKI ikut terseret akibat sangat tergantung kepada Soekarno.

CIA

Versi keempat melibatkan CIA dan dikemukakan oleh Peter Dale Scott (1985) dan Geoffrey Robinson (1984). Dalang utama Gerakan 30 September adalah Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat yang ingin menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis (teori domino). CIA bekerja sama dengan sebuah klik Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI.

Tidak ada pelaku tunggal

Ini terungkap dalam pidato *Nawaksara* dan *Pelengkap Nawaksara* Soekarno (Mulyosudarmo 1997), yang menganggap Gerakan 30 September adalah sebuah konspirasi unsur-unsur Nekolim (Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme) untuk menggagalkan jalannya revolusi Indonesia. Hal ini terjadi karena ditunjang pimpinan PKI yang “keblinger dan oknum-oknum yang tidak benar”.

Kudeta Merangkak Soeharto dan kudeta merangkak MPRS

Teori “Kudeta Merangkak” disampaikan oleh Soebandrio (2001). Ini merupakan analisis *post factum* yang dikemukakan dengan melihat rangkaian kejadian setelah peristiwa itu terjadi (Adam 2007). Analisis Wertheim (1970) sudah lama mengarah kepada Soeharto. Namun kudeta merangkak itu bukan saja dilakukan oleh Soeharto dan kelompoknya tetapi dilaksanakan berbarengan dengan “kudeta merangkak” MPRS (Adam 2010). MPRS berperan sangat besar secara yuridis untuk mengalihkan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto seperti diuraikan Suwoto Mulyosudarmo.

Pembantaian 1965

Peristiwa G30S 1965 secara faktual diikuti oleh pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan itu tak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah, baik proses maupun jumlah korbannya. Menurut Robert Cribb (2001), ada beberapa cara untuk menghitung walaupun masing-masing mengandung kelemahan. Menurut *Facts Finding Commission* yang dibentuk setelah peristiwa berdarah tersebut, jumlah korban adalah 78.000 orang. Kopkamtib dalam salah satu laporannya menyebut angka satu juta jiwa sementara Robert Cribb menganggap 500.000 orang.

Mereka Yang Terbuang

Tahun 1965 ribuan orang Indonesia, diplomat, wartawan, anggota Parlemen, termasuk Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) yang dikirim Presiden Soekarno untuk belajar teknologi di luar negeri, terutama di negara sosialis, menjadi terhalang pulang. Bahkan kewarganegaraan mereka dicabut. Mereka meminta suaka dari suatu negara ke negara lain atau menurut istilah Gus Dur menjadi orang *kelayapan*.

Beberapa orang di kalangan eksil ini telah menulis memoar² yang memberi perspektif baru tentang peristiwa 1965 dan dampaknya. Sebagai contoh, tahun 2006 terbit *Memoar Perempuan Revolusioner* berdasar wawancara Hersri Setiawan, mantan pimpinan Lekra Jawa Tengah, dengan Fransisca Fanggalidaj. Perempuan itu dilahirkan di Timor tahun 1925. Dia aktif pada gerakan pemuda Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan ikut berjuang dalam pertempuran di Surabaya November 1945. Tahun 1947 ia dikirim ke beberapa negara Eropa dan India untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan internasional pemuda. Di Kalkuta, India, ia mengikuti kongres pemuda internasional.

Tahun 1957 Fransisca diangkat sebagai anggota komisi luar negeri DPRGR/MPRS mewakili golongan wartawan. Tahun 1965 ia beberapa kali menyertai rombongan Presiden ke luar negeri termasuk menuju Aljazair tempat Kongres Asia-Afrika kedua direncanakan namun batal. Fransisca dari Aljazair melanjutkan perjalanan untuk mengikuti konferensi pemuda di Chile. Di sinilah ia mendengar meletus G30S dan Fransisca merasa kuatir untuk pulang karena ia termasuk pendukung Soekarno.

Tahun 1965-1985 Fransisca berada di Beijing, ia tidak berani mengontak keluarganya di Indonesia karena takut membahayakan keselamatan mereka. Anaknya tujuh orang, yang tertua baru berusia 13 tahun, sementara suaminya juga ikut ditangkap. Anak-anak terpaksa ditiip kepada keluarga dan kenalan baik mereka. Tahun 1985 Fransisca meminta suaka di negeri Belanda, di sinilah ia baru berani menelpon anak-anaknya. Dapat dibayangkan betapa beratnya perasaan anak-anak menerima telpon tersebut, rasa kangen, haru, sedih, mungkin bercampur kesal juga karena sekian lama tidak ada berita sama sekali. Di Belanda Fransisca masih aktif dalam Komite Indonesia-Belanda dan yayasan memajukan studi Asia.

Salah satu putri Fransisca melahirkan anak lelaki yang kemudian menjadi aktor terkemuka Indonesia, Reza Rahadian. Fransisca meninggal di Belanda November 2013. Beberapa waktu sebelumnya Reza dan ibunya menengok. "Oma mengapa memilih berpisah dengan anak dan cucu?" Dia bilang: "Seandainya Oma bisa pulang ke Indonesia, tentu Oma akan kembali. Tapi Oma khawatir kalian terancam." Apakah ucapan terakhir Fransisca Fanggalidaj kepada cucunya Reza Rahadian? "Merdeka itu adalah pulang."

2. Sintesis dan bibliografi terbaru terdapat dalam Chambert-Loir (2016a, 2016b).

Diburu di Pulau Buru

Judul di atas berasal dari sebuah karya Hersri Setiawan (2008) yang pernah ditahan di Pulau Buru tahun 1969-1979 (Adam 2008) dan yang aktif dalam membawa suara para eksil atau eks tapol kepada masyarakat Indonesia. Selama sepuluh tahun para tapol 65 golongan B sebanyak lebih dari 10.000 orang dibuang ke Pulau Buru dan diperbudak di sana. Di antaranya terdapat Pramoedya Ananta Toer yang melahirkan roman tetralogi yang kesohor. Pram mengungkapkan kekejaman di sana dalam buku *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* (1995).

Tesis pascasarjana di UI tentang Pulau Buru ditulis I.G. Krisnadi (2000), dosen Universitas Jember dan diterbitkan LP3ES. Baru-baru ini terbit novel *Amba* karya Laksmi Pamuntjak (2012) yang berlatar Pulau Buru. Tahun 2003 penulis diangkat menjadi anggota Pengkajian dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang beranggotakan 25 orang termasuk Munir. Tim ini menetapkan salah satu kasus yang dianggap sangat meyakinkan untuk menjerat Soeharto adalah kasus Pulau Buru 1969-1979.

Stigma sampai anak-cucu

Tahun 1981 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi bahwa mereka yang terlibat G30S dan keluarganya tidak boleh menjadi PNS/ABRI. Stigma sudah ditempelkan di kening sang anak sungguhpun ia tidak memilih untuk dilahirkan di tengah keluarga yang tersangkut G30S. Sejak era Reformasi bermunculan buku yang berasal dari sejarah lisan tentang korban 1965. Yang pertama terbit dan dikerjakan secara serius adalah *Menembus Tirai Asap* (Haryo 2003) dan disusul *1965: Tahun Yang Tidak Pernah Berakhir* (Roosa, Ratih dan Farid, peny., 2004). Memoar dari kalangan AURI seperti Omar Dani (Surodjo & Soeparno 2001) diluncurkan, demikian pula dari aktivis kiri. Yang ironis adalah biografi Kiai Haji Achmadi Moestahal (2002) yang ditarik oleh anaknya sendiri dengan memborong di toko buku. Soe Tjen Marching (2017), putri seorang korban, melakukan serangkaian wawancara dengan para korban dan keluarganya (generasi kedua dan ketiga). Maharani Mancanegara (cucu seorang tapol yang dibuang ke Pulau Buru) menampilkan karya seni rupa di Galeri Soemardja Institut Teknologi Bandung berdasarkan catatan harian kakeknya ("Fabel untuk Pulau Buru", *Tempo*, 5-11 Maret 2018). Ayah dari Maharani Mancanegara adalah seorang Profesor Riset di LIPI. Yang menarik adalah munculnya situs *Ingat65* untuk berbagi cerita bagi generasi muda, keluarga korban 65 atau bukan.

Buku yang mengegegerkan adalah memoar Ribka Tjiptaning yang berjudul *Aku Bangga Jadi Anak PKI* (2002). Mungkin pilihan judul itu merupakan luapan kekesalan terhadap pemerintah Orde Baru. Namun efeknya sungguh keras pada sebagian kalangan Islam yang anti-komunis. Padahal kalau dibaca isi bukunya yang terlihat adalah penderitaan seorang anak yang ayahnya pengusaha yang ditangkap karena dekat dengan PKI. Tjiptaning harus

merantau ke ibukota dan berganti nama agar bisa diterima di sekolah. Bekerja sebagai penjual tiket bis malam untuk menyambung hidup. Dengan susah payah ia berhasil menamatkan kuliah di Fakultas Kedokteran UKI. Aktif di organisasi nasionalis, ia kemudian berhasil menjadi anggota DPR.

Bila buku Tjiptaning menghebohkan, maka judul buku Okky Asokawati cukup menyejukkan, *Jangan Menoleh Ke Belakang* (Bagdja 2005). Okky adalah putri AKBP Anwas Tanuamidjaja, Wakil Komandan G30S. Setelah ayahnya ditangkap dan ditahan selama belasan tahun, keluarga ini harus menghidupi diri mereka sendiri. Sang ibu memberi les piano dan mengajar bahasa Inggris. Setiap Minggu mereka mengunjungi sang ayah (dipanggil *Bap* oleh Okky) di penjara Cipinang, sambil membawa rantang makanan. Ribka Tjiptaning menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP dan Okky Asokawati anggota Parlemen mewakili PPP (Adam 2015). Telah muncul pula buku dari generasi ketiga korban G30S.

Tanggapan pemerintah

Walaupun *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) yang diterbitkan sejak tahun 1975 dianggap tidak layak dijadikan pegangan seperti dikemukakan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono, terdapat upaya untuk merevisi atau melakukan pemutakhiran buku tersebut yang pada prinsipnya tidak mengubah versi Orde Baru. Tahun 2008 terbit *Sejarah Nasional Indonesia, edisi pemutakhiran*, dengan editor R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa.

Pada buku SNI edisi pemutakhiran ini disampaikan bahwa tahun 1967 Presiden Soekarno menyampaikan pidato di depan paripurna MPRS yang komposisi keanggotaannya sudah diubah Soeharto. Pidato tersebut menurut buku ini “mendapat tanggapan dari seluruh rakyat, dengan pendapat Presiden Soekarno berusaha menambah gawatnya situasi politik”. Padahal *Pelengkap Nawaksara* itu mengungkapkan siapa dalang G30S. Buku ini tidak lupa mengutip harian *Berita Yudha* 26 Januari 1967 “Para alim ulama Jabar mengatakan tidak lagi mengakui Presiden Soekarno sebagai Presiden karena telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam dan UUD 1945 serta TAP MPRS”. Tidak dijelaskan syariat Islam yang mana yang dilanggar Bung Karno.

Buku berikutnya adalah *Malam Bencana* (Abdullah dkk., peny., 2012-13) yaitu malam tanggal 30 September 1965 ketika enam orang jenderal sekaligus terbunuh tidak di medan perang (Adam 2009). Pada jilid pertama, dalam tulisan Ambarwulan (Pusat Sejarah TNI) dan Aminuddin Kasdi (Universitas Negeri Surabaya) disimpulkan bahwa “Gerakan 30 September adalah sebuah pemberontakan yang melibatkan kesadaran penuh seluruh unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan menggunakan sejumlah unsur di TNI AD melalui jalur rahasia Biro Khusus”. Ini mengulang versi Orde Baru tentang G30S. Lalu bagaimana keterlibatan Presiden Soekarno? Menurut Nina Herlina Lubis “jelas ia ikut terlibat dalam perencanaan G30S, namun pada akhirnya

skenario diambil alih oleh Soeharto...” (buku bagian 1, hlm. 297). Sementara itu Aminuddin Kasdi mencatat 20 alasan keterlibatan Soekarno dan 6 alasan ketidakterlibatan Bung Karno (buku bagian 1, hlm. 327-329). Jadi jauh lebih banyak alasan keterlibatan Presiden Soekarno.

Episode keempat

Narasi Baru

Tahun 2008 terbit terjemahan buku John Roosa yang ditulis dalam bahasa asli tahun 2006 (penerjemah Hersri Setiawan), *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Menurut buku ini kelemahan utama Gerakan 30 September adalah tidak punya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan yakni kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan pihak Biro Khusus PKI (Sjam, Pono, Bono). Sjam memegang peran sentral karena ia penghubung antara kedua pihak ini. Namun ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno bahkan diminta dihentikan, maka kebingungan terjadi. Kedua kelompok pecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Khusus tetap melanjutkan. Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dengan kedua/ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam.

Buku ini menyederhanakan misteri dengan metode detektif. Sjam Kamaruzzaman bukanlah agen ganda melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun. Pelaksana Biro Khusus PKI yang ditangkap tahun 1968 ini baru dieksekusi tahun 1986. Ia bagai putri Scheherazad yang menunda pembunuhan dirinya dengan menceritakan kepada raja sebuah kisah setiap malam, sehingga mampu bertahan 1001 malam.

Dokumen Supardjo mengungkapkan mengapa gerakan itu gagal dan tidak bisa diselamatkan. Kerancuan antara “penyelamatan Presiden Sukarno” dan “percobaan kudeta” dengan membubarkan kabinet dijelaskan dengan gamblang. Di sisi lain, jauh sebelum peristiwa berdarah itu, AS telah mendiskusikan segala tindakan yang perlu untuk mendorong PKI melakukan gebrakan lebih dahulu sehingga dapat dipukul secara telak oleh Angkatan Darat. Dan Aidit pun terjebak. Karena sudah tahu sebelumnya, maka Soeharto adalah jenderal yang paling siap tanggal 1 Oktober 1965.

Karya ini mengungkapkan bahwa Gerakan 30 September lebih tepat dianggap sebagai aksi (untuk menculik tujuh jenderal dan menghadapkan kepada Presiden) bukan sebagai gerakan. Karena peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta yang dilakukan secara serampangan yang dapat diberantas dalam waktu satu-dua hari ditambah perlawanan tidak berarti di Jawa Tengah. Namun aksi ini (yang kemudian ternyata menyebabkan tewasnya enam jenderal) kemudian oleh Soeharto dkk. dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya yang di lapangan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dengan korban lebih dari setengah juta jiwa.

Kekuatan buku ini karena menggunakan sumber yang berasal dari orang-orang yang merupakan lingkaran terdalam peristiwa G30S, yaitu dokumen Supardjo dan pledoi Iskandar Subekti (yang mengetik pengumuman-pengumuman Gerakan 30 September) serta wawancara mendalam dengan anggota biro Khusus PKI “Hasan” (nama sebenarnya Asep Suryaman). Sumber-sumber di atas dilengkapi dengan arsip AS yang telah terbuka dari waktu ke waktu.

Arus Balik

Perlawanan muncul terhadap upaya pelurusan sejarah. Buku John Roosa, *Dalih pembunuhan Massal*, dilarang Kejaksaan Agung bulan Desember tahun 2009. Padahal buku ini terpilih sebagai salah satu dari tiga buku terbaik di bidang ilmu-ilmu sosial dalam *International Convention of Asian Scholars*, Kuala Lumpur, 2007. Sebelumnya, tahun 2007, Kejaksaan Agung juga melarang buku-buku pelajaran sejarah yang dianggap tidak membahas Peristiwa Madiun dan G30S.

Taufiq Ismail menerbitkan buku *Katastrofi Mendunia: Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma dan Narkoba* tahun 2005 dengan kata pengantar Taufik Abdullah. Buku ini mengungkapkan korban yang berjatuh di seluruh dunia yang dibunuh oleh orang-orang komunis. Namun sesungguhnya yang terjadi di Indonesia tahun 1965 adalah sebaliknya. Buku senada oleh penulis yang sama diterbitkan tahun 2015 dengan judul *Matine Gusti Allah, Riwayat Palu Arit Sedunia Menajiskan Tuhan dan Agama*.

Tahun 2005 Aminuddin Kasdi (guru besar di Universitas Negeri Surabaya) dengan Dr. Ambar Wulan (Pusat Sejarah TNI) menerbitkan buku *G30S PKI/1965: Bedah Ceasar Dewan Revolusi Indonesia* (pengantar Shalahuddin Wahid). Tahun 2007 buku senada diterbitkan pengarang yang sama dengan judul *Tragedi Nasional 1965*. Aktivis anti-PKI lainnya seperti Alfian Tanjung (pengajar Universitas Uhamka Jakarta) menerbitkan beberapa buku yang isinya lebih kurang sama: *Mengganyang Komunis: langkah & strategi menghadapi kebangkitan PKI* (2006), *Menangkal Kebangkitan PKI: strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI* (2007) dan *Indikasi dan sistematika Kebangkitan PKI* (2006). Kol. (pur.) Firoz Fauzan menerbitkan beberapa buku, antara lain *Misteri Tragedi Nasional 1 Oktober 1965: Dalam Ganda Biro Khusus PKI* (2009), *Pengkhianatan PKI* (2009), dan *Civil War ala PKI, 1965: Menyingkap Dewan Revolusi PKI* (2011).

Episode kelima

Film “the Act of Killing” dibanding “Pengkhianatan G30S/PKI”

Selain dari buku John Roosa yang monumental, media lain yang banyak menarik perhatian adalah film *the Act of Killing* (dalam bahasa Indonesia

Jagal; Oppenheimer 2012). Film ini sangat penting karena para pelaku bersaksi, sebelumnya yang terdengar hanya suara korban.

Film ini sebetulnya bisa dibandingkan dengan film “Pengkhianatan G30S/PKI” dalam berbagai aspek termasuk penggambaran kekerasan. Kedua film tersebut sungguh luar biasa dalam hal jumlah dan kekhasan penonton. Film “Pengkhianatan G30S/PKI” (selanjutnya disingkat PG) ditonton oleh jutaan penonton selama 14 tahun (1984-1997). Film “The Act of Killing” (selanjutnya disingkat AK) diputar pada hampir semua pertemuan ilmiah yang diadakan pengamat Indonesia di benua Australia, Asia, Eropa dan Amerika tahun 2012-2013. Di Indonesia film ini diputar di beberapa perguruan tinggi dan lembaga advokasi.

Dari sisi keberhasilan menarik penonton dan penghargaan, dua film tersebut berhasil tetapi dalam konteks yang sangat berbeda. Arifin C. Noer mendapat penghargaan di negaranya sendiri sebagai penulis skenario terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1984. Sementara itu AK telah menyabet penghargaan dalam festival film di Istanbul, Valenciennes, Warsawa, Barcelona dan dinominasikan sebagai film dokumenter terbaik Piala Oscar. Namun demikian, AK belum bisa dikatakan berdampak seperti PG di Indonesia. Meskipun bisa diakses dengan mudah dalam versi asli di internet (sesuai keinginan Joshua Oppenheimer) dan dibuat setelah melakukan riset selama delapan tahun, AK belum bisa melawan narasi Orde Baru secara keseluruhan karena propaganda rezim Soeharto begitu kuat.

Film Senyap

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember (sebagaimana diberitakan Tempo.co, 10 Desember 2014) dimeriahkan dengan pemutaran film *Senyap* atau *The Look of Silence* (Oppenheimer 2014). Film tersebut diputar serentak di seluruh Indonesia pada 457 titik, yang 160 di antaranya merupakan pemutaran terbuka dari Aceh sampai Papua, seperti Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Semarang, Kediri, Malang, Jember, Makassar, Palu, Manado, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Jayapura, dan Wamena. Pemutaran tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga jaringan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Senyap menceritakan salah seorang anggota keluarga korban di Indonesia yang menemui para pelaku pembunuhan. Adi Rukun, adik bungsu korban, bertekad memecah belenggu kesenyapan dengan mendatangi para pembunuh kakaknya untuk mengungkap kebenaran dan menapaki rekonsiliasi.

IPT-65 di Den Haag, November 2015

Pada bulan November 2015 berlangsung *International People's Tribunal* mengenai kasus 1965 di Den Haag, Belanda. Di dalam keputusannya, tujuh

majelis hakim internasional yang dipimpin Zak Jacob dari Afrika Selatan memutuskan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan di Indonesia yang mencakup pembunuhan, penahanan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual (*Final Report IPT-65*, 2017).

Pengadilan rakyat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa terhadap pemerintah Indonesia kecuali tekanan moral. Namun pengadilan ini memiliki cukup dampak terlihat dari penyelenggaraan simposium mengenai 1965 di Hotel Aryaduta Jakarta, April 2016, yang untuk pertama kalinya dibiayai oleh pemerintah.

Dari sisi lain, pengadilan ini diikuti terbitnya beberapa buku. Untuk menyiapkan tuntutan dalam IPT-65, beberapa peneliti telah mengumpulkan banyak dokumen dan tulisan yang terkait kejahatan kemanusiaan 1965. Selain dari *Laporan Final IPT-65* (Van Klinken 2017), *Dari Beranda Tribunal: Bunga Rampai Kisah Relawan* (Santoso dkk. 2017), bulan Februari/Maret 2018 telah terbit tiga buku mengenai pembunuhan massal 1965, yaitu Geoffrey Robinson, *The Killing Season, A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*, dan Jess Melvin, *The Army and The Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder*; serta Katherine McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman (eds), *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*.

Masalah rekonsiliasi

Persoalan rekonsiliasi dibahas dalam karya akademis di luar negeri. Juni 2003 Budiawan mempertahankan disertasi di National University of Singapore dengan judul *Breaking the Immortalized Past: Anti-Communist, Discourse and Reconciliatory Politics in Post-Soeharto Indonesia* yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh Elsam *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto* (2004).

Disertasi berikutnya berasal dari Ahmad Suhelmi (Ph.D. ilmu politik, Department of Political Science, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 2005) berjudul *Muslim Political Elite and the Revival of the Left in Indonesian Politics, 1996-2001*. Disertasi itu kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dengan judul *Islam dan Kiri, Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca Soeharto* (2007).

Secara hukum, rekonsiliasi diupayakan melalui Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disahkan Presiden Megawati September 2004. Namun kemudian Undang-Undang tersebut dibatalkan dengan *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Jimly Asshidiqie tahun 2006. Undang-Undang itu telah dirobuhkan sebelum komisi tersebut terbentuk (Adam 2006).

Pada akhir Desember 2013 Pengurus Besar Nahdatul Ulama yang diprakarsai As'ad Said Ali, mantan Wakil Kepala BIN, menerbitkan "buku putih" tentang sejarah hubungan mereka dengan PKI (2013). Sebelumnya

sikap kenegarawanan telah ditunjukkan KH Abdurrachman Wahid yang pada 14 Maret 2000 mengatakan, ketika menjabat ketua umum PBNU ia sudah meminta maaf kepada para korban Gerakan 30 September. Tahun 2002 rekonsiliasi justru dipelopori oleh anak-anak muda NU yang tergabung dalam Syarikat (santri untuk advokasi masyarakat), mula-mula di Yogyakarta dan meluas ke seluruh Pulau Jawa.

Masih di Jawa Timur, sebelum menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga memelopori rekonsiliasi dengan mengundang aktivis PKI, Soemarsono, Gubernur Militer Madiun 1948 dan tokoh pemuda Surabaya November 1945, untuk silaturahmi di pesantren keluarganya di Magetan Jawa Timur.

Pada lapisan lain di kalangan putra-putri tokoh yang orang tuanya dulu pernah berkonflik, terjadi rekonsiliasi. Pada Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang memiliki visi “berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru” terdapat Amelia Yani, Ilham Aidit, Sarjono Kartosuwiryo, Ferry Omar Dani, Chalid Prawiranegara. Penasihat organisasi ini Letjen (pur.) Agus Wijoyo yang merupakan putra pahlawan revolusi Sutojo. Mereka menerbitkan buku yang berjudul *Children of War* tahun 2013.

Di kalangan masyarakat, sebuah kelompok yang terdiri dari korban perempuan telah memilih bercerita sambil berlagu membagi pengalaman, tanpa penuntutan. Paduan suara Ibu-ibu Dialita memilih lagu-lagu bersejarah seperti lagu “Taman Bunga Plantungan” karya Ibu Nungtjik, atau lagu “Untuk Anakku” karya Ibu Heryani Busono yang direkam di CD *Dunia milik kita* (2016).

Kesimpulan

Lima puluh tahun studi mengenai G30S sejak tahun 1965 sampai 2018 dapat dibagi atas lima episode. Pada episode pertama terjadi perdebatan tentang siapa dalang G30S: apakah PKI atau ini hanya masalah internal Angkatan Darat. Dalam episode kedua, Orde Baru sudah berkuasa penuh dan melakukan monopoli sejarah, hanya satu versi yang diperbolehkan untuk diketahui masyarakat dan dipelajari siswa. Kejatuhan Soeharto tahun 1998 menandai episode ketiga ketika para korban berbicara dan menulis. Terbitnya buku John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal*, tahun 2008, menandai episode keempat dengan munculnya narasi baru yang utuh mengenai G30S. Episode kelima dimulai ketika para pelaku mengaku seperti terlihat pada film *Jagal* (2012) dan *Senyap* (2014) yang dibuat Joshua Oppenheimer.

Dari buku-buku yang terbit (kembali) pada episode ketiga sejak 1998 tampak bahwa studi G30S paling sedikit mencakup lima aspek yaitu 1) peristiwa G30S itu sendiri termasuk siapa dalangnya, 2) Pembunuhan massal tahun 1965/1966, 3) Eksil, pencabutan kewarganegaraan orang-orang Indonesia yang sedang berada di luar negeri, 4) Pembuangan paksa ke Pulau Buru, 5) Stigma terhadap korban dan keluarganya. Pemilahan ini dapat membantu pemerintah dalam penyelesaian kasus 1965.

Pembaharuan historiografi peristiwa 1965 di Indonesia terjadi karena beberapa alasan. Sumber baru ditemukan melalui arsip di dalam dan di luar negeri. Bahan sejarah lisan memperkuat keterbatasan arsip tertulis mengenai peristiwa 1965. Yang lebih penting lagi sejarah kini ditulis bukan saja dari perspektif pemenang tetapi juga oleh korban. Kalau dahulu sejarah itu digunakan pula antara lain sebagai alat penindas, sekarang sejarah bermanfaat sebagai medium pembebas bagi para penyintas atau *survivor*.

Dari pihak korban, secara nasional wilayah penelitian kian meluas. Dulu hanya dikenal Jawa, Bali dan Sumatera. Sudah ada penelitian tentang kamp penahanan di Moncongloe, Sulawesi Selatan, yang berasal dari tesis pascasarjana di UNHAS (Universitas Hasanuddin, Makassar) dan telah diterbitkan. Yang menarik pula Walikota Palu telah mengeluarkan keputusan menyangkut rehabilitasi korban 1965. Putu Oka Sukanta menyunting buku tentang pengalaman para korban di Sulawesi.

Terdapat perkembangan yang menggembirakan dari sudut sejarah dengan dibukanya arsip seputar tahun 1965 di Rusia, Tiongkok (arsip Departemen Luar Negeri) dan Jepang. Tahun 2013 diterbitkan buku *1965, Indonesia and The World, Indonesia dan Dunia* berdasarkan seminar yang diadakan Goethe Institut dua tahun sebelumnya di Jakarta (Schaefer and Wardaya 2013).

Seminar internasional tentang G30S 1965 diadakan di Singapura tahun 2009, Canberra 2012, secara simultan di STF Driyarkara Jakarta, Toronto, Melbourne dan London melalui teleconference tahun 2014, Amsterdam Oktober 2015 dan Frankfurt November 2016. Pada Juni 2014 diadakan lokakarya di Osaka membicarakan tentang *Politicide* 1965. Kerjasama antara sejarawan Indonesia dan sejarawan asing bisa dilihat dalam hampir semua seminar dan terbitan kolektif. Usaha-usaha akademis itu mendorong pembaharuan historiografi tetapi berasal dari kalangan yang terbatas, tidak menyentuh para pengambil keputusan politik.

Penyelenggaraan IPT 65 di Den Haag, November 2015, mendorong pelaksanaan Simposium 1965 yang untuk pertama kalinya dibiayai pemerintah di hotel Aryaduta Jakarta, April 2016. Penolakan terhadap penyelenggarannya menyebabkan diadakan simposium tandingan di Balai Kartini sesudah itu. Pembatalan seminar 1965 yang akan diselenggarakan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), penyerangan ke kantor LBH Jakarta medio September 2017³, dan perintah Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, kepada prajurit untuk menonton film *Pengkhianatan G30S/PKI* tanggal 30 September 2017, telah menjadikan isu anti-komunis sebagai cara menggalang kekuatan kalangan Islam dalam Pemilihan serempak Kepala Daerah Juni 2018 dan meningkatkan popularitas calon menjelang Pemilihan Presiden April 2019.

3. Lihat Wieringa dalam keluaran ini.

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman, 2000, "Pengendalian Sejarah Demi Kekuasaan", *dalam* J.B. Kristanto (peny.), *Seribu Tahun Nusantara*. Jakarta: Kompas, p. 203-219.
- Adam, Asvi Warman, 2006, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak (terbitan pertama 2004).
- Adam, Asvi Warman, 2007, *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam, Asvi Warman, 2008, "Epilog" *dalam* Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru*. Magelang: Indonesia Tera, p. 592-601.
- Adam, Asvi Warman, 2009, *Membongkar Manipulasi Sejarah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Adam, Asvi Warman, 2010, *Menguak Misteri Sejarah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Adam, Asvi Warman, 2015, *Melawan Lupa, Menepis Stigma, Setelah Prahara 1965*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Adams, Cindy, 1966, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat* (penerjemah: Mayor Abdul Bar Salim). Jakarta: Gunung Agung (edisi revisi tahun 2007 diterjemahkan Syamsul Hadi).
- Anderson, Benedict, 1987, "How Did the Generals Die?", *Indonesia* 43, p. 109-134.
- Anderson, Benedict, Mc Vey, Ruth, Bunnell, F.P., 1971. *Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca: Cornell University, Publication No. 52.
- As'ad Said Ali, 2013, *Benturan NU-PKI, 1948-1965*. Jakarta: PBNU.
- Atmowiloto, Arswendo, 1988, *Pengkhianatan G30S/PKI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- de Baets, Antoon, 2009, *Responsible History*. New York, NY: Berghahn Books.
- Bagdja, Muara, 2005, *Okky Asokawati: Jangan Menoleh Ke Belakang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiawan, 2004, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam (terjemahan dari disertasi pada NUS Singapore berjudul *Breaking the Immortalized Past: Anti-Communist, Discourse and Reconciliatory Politics in Post-Soeharto Indonesia*, 2003).
- Chambert-Loir, Henri, 2016a, "Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965", *Archipel* 91, p. 119-145.
- Chambert-Loir, Henri, 2016b, "Bibliography of Exile Literature (Sastra Eksil)", *Archipel* 91, p. 177-183.
- Cribb, Robert, 2003, *Pembunuhan Massal di Jawa-Bali 1965/1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa bekerjasama dengan Yayasan Indonesia (terjemahan dari *The Indonesian killings of 1965-1965: studies from Java and Bali*, Clayton, Vic.: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1990).
- Cribb, Robert, 2001, "How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980)," *dalam* Ingrid Wesel and Georgia Wimhofer (eds), *Violence in Indonesia*. Hamburg: Abera-Verl., p. 82-99.
- Dake, Antonie C.A., 1973, *In The Spirit of The Red Banteng, Indonesian Communists Between Moscow and Peking*. The Hague: Mouton.
- Djalita (paduan suara), 2016, *Dunia Milik Kita*, CD.
- Dinuth, Alex (penyunting), 1997a, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*. Jakarta: Intermasa.
- Dinuth, Alex (penyunting), 1997b, *Dokumen Terpilih Sekitar G30S/PKI*. Jakarta: Intermasa.
- Fauzan, Firos, 2009, *Pengkhianatan PKI (Partai Komunis Indonesia)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Fauzan, Firos, 2009, *Misteri Tragedi Nasional 1 Oktober 1965: Dalang Ganda Biro Khusus*. Jakarta: Fauzan Firos.

- Fauzan, Firos, 2011, *Civil War ala PKI, 1965: Menyingkap Dewan Revolusi PKI*. Jakarta: Accelerate Foundation.
- Forum Silaturahmi Anak Bangsa, 2013, *The Children of War*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haryo, H.D., 2003, *Menembus Tirai Asap, Kesaksian Tahanan Politik 1965*. Jakarta: Lontar.
- Hughes, John, 2014, *The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*. Singapore: EDM (edisi pertama, 1967).
- Ismail, Taufiq, 2005, *Katastrofi Mendunia, Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma dan Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.
- Ismail, Taufiq, 2015, *Matine Gusti Allah, Riwayat Palu Arit Sedunia Menajiskan Tuhan dan Agama*. Jakarta: Mahaka Publishing.
- Kasdi, Aminuddin, 2001, *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.
- Kasdi, Aminuddin & G. Ambar Wulan, 2005, *G30S PKI/1965, Bedah Ceasar Dewan Revolusi Indonesia*. Surabaya: Java Pustaka Media Utama.
- Kasdi, Aminuddin & G. Ambar Wulan, 2007, *Tragedi nasional 1965*. Surabaya: UNESA University Press.
- Katoppo, Aristides dkk., 2000, *Menyingkap Kabut Halim*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Van Klinken, Helene (ed), 2017, *Final Report of The International People's Tribunal on Crimes against Humanity in Indonesia 1965*. The Hague-Jakarta: IPT 65 Foundation.
- Krisnadi, I.G., 2000, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo, 2000, "Indonesian historiography in search of identity," *Humaniora* 12 (1), p. 79-85.
- McGregor, Katharine, Jess Melvin & Annie Pohlman (eds), 2018, *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics, and Legacies*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Melvin, Jess, 2018, *The Army and The Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder*. New York: Routledge.
- Moestahal, Achmadi, 2002, *Dari Gontor ke Pulau Buru*. Yogyakarta: Syarikat.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1997, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis dan Yuridis atas Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notosusanto, Nugroho & Ismail Saleh, 1968, *The Coup Attempt of September 30 Movement in Indonesia*. Jakarta: Pembimbing Masa (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional: percobaan kup G30S/PKI di Indonesia*, Jakarta, Intermasa, 1989).
- Pamuntjak, Laksmi, 2012, *Amba*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto, Bambang & Asvi Warman Adam, 2005, *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Robinson, Geoffrey, 1984, "Some arguments Concerning US Influences and Complicity in the Indonesian 'Coup' of Octobre 1, 1965," unpublished manuscript (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: *Argumentasi Atas Pengaruh dan Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Kudeta 1 Oktober 1965 di Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 2000).
- Robinson, Geoffrey, 2005, *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LkiS (Diterjemahkan dari *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995).
- Robinson, Geoffrey, 2018, *The Killing Season, a History of the Indonesian Massacres, 1965-1966*. Princeton: Princeton University Press.
- Roosa, John, 2008, *Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra (Diterjemahkan dari *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto Coup d'Etat in Indonesia*, Madison, The University of Wisconsin Press, 2006).

- Roosa, John, Ayu Ratih dan Hilmar Farid (eds), 2004, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir. Memahami Pengalaman Korban 1965. Esai-Esai Sejarah Lisan*. Jakarta: Elsam, TRUK dan ISSI.
- Santoso, Aboeprijadi dkk. (peny.), 2017, *Dari Beranda Tribunal*. Bandung: Ultimur.
- Schaefer, Bernd & Baskara Wardaya, 2013, *1965, Indonesia and The World, Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Goethe Institut and Gramedia Pustaka Utama (bilingual edition).
- Scott, Peter Dale, 1985, "The United States and the Overthrow of Sukarno 1965-1967," *Pacific Affairs* 58, p. 239-264.
- Sekretariat Negara, 1992, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta: PT Ghalia atas izin Sekretariat Negara RI.
- Setiawan, Hersri & Fransisca Fanggidaej, 2006, *Memoar Perempuan Revolusioner*. Yogyakarta: Galang Press.
- Setiawan, Hersri, 2008, *Memoar Pulau Buru*. Magelang: Indonesia Tera.
- Soebandrio, 2001, *Kesaksianku tentang G30S*. Jakarta, Forum Pendukung Reformasi Total.
- Soejono, R.P. dan R.Z. Leirissa, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia, edisi pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soe Tjen Marching, 2017, *The End of Silence, Accounts of the 1965 Genocide in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Stanley (penyunting), 1995, *Bayang-Bayang PKI*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Suhelmi, Ahmad, 2007, *Islam dan Kiri, Respons Elite Politik Islam Terhadap Isu Kebangkitan Komunis Pasca Soeharto*. Bandung: Serambi (terjemahan dari disertasi pada International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, berjudul *Muslim Political Elite and the Revival of the Left in Indonesian Politics, 1996-2001*, tahun 2005).
- Sulistiyono, Singgih Tri, 2008, *Historiografi Pembebasan untuk Indonesia Baru*, pidato pengukuhan guru besar sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Maret 2008.
- Sulistyo, Hermawan, 2000, *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Surodjo, Benedicta A. & Soeparno, J.M.V., 2001, *Pledoi Omar Dani, Tuhan Pergunakan Hati, Pikiran dan Tanganku*. Jakarta: ISAI.
- Tanjung, Alfian, 2006, *Mengganyang Komunis, Langkah & Strategi Menghadapi Kebangkitan PKI*. Jakarta: Taruna Muslim Press.
- Tanjung, Alfian, 2006, *Indikasi dan sistematika kebangkitan PKI*. Jakarta: Taruna Muslim Press.
- Tanjung, Alfian, 2007, *Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Perlawanan Nasional Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta: Taruna Muslim Press.
- Tjiptaning, Ribka, 2002, *Aku Bangga Jadi Anak PKI*. Jakarta: Cipta Lestari.
- Toer, Pramoedya Ananta, 1995, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta: Lentera.
- Wertheim, W.F., 1970, "Suharto and the Untung Coup: The Missing Link," *Journal of Contemporary Asia* 1(2), p. 20-57.